

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH OLEH DPPKAD KOTA LUBUKLINGGAU**



**SKRIPSI OLEH :**

**ERYNA NOORWANRISHA**

**01031481518051**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
OLEH DPPKAD KOTA LUBUKLINGGAU**

Disusun Oleh :


Nama : Eryna Noorwanrisha  
NIM : 01031481518051  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan


Dosen Pembimbing  
Ketua

Tanggal : 22/02 2018

  
Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP.196608201994022001

Anggota

Tanggal : 22/02 2018

  
Hj. Rina Tigandrakirana DP, S.E., M.M., Ak  
NIP.196509111992032002

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
OLEH DPPKAD KOTA LUBUKLINGGAU**

Disusun Oleh :

Nama : Eryna Noorwanrisha  
NIM : 01031481518051  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 12 April 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, April 2018

Ketua

Anggota

Anggota



Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP.196608201994022001



Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak  
NIP.196503111992032002



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak  
NIP.196905251996032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eryna Noorwanrisha

NIM : 01031481518051

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

### **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH OLEH DPTKAD KOTA LUBUKLINGGAU**

Pembimbing :

Ketua : Ermadiani, S.E., M.M., Ak

Anggota : Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak

Tanggal Ujian : 12 April 2018

Adalah benar karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, April 2018

Pembuat Pernyataan



Eryna Noorwanrisha

01031481518051

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan”*

(Ali Bin Abi Thalib)

*“Agama tanpa ilmu adalah buta,  
Ilmu tanpa agama adalah lumpuh”*

(Albert Einstein)

*“Religion with no knowledge,  
The world will be ended”*

**Kupersembahkan Skripsi**

**ini Untuk :**

*ALLAH SWT*

*Suamiku Tercinta*

*Anakku Tercinta*

*Orang Tuaku Tercinta*

*Saudaraku Tercinta*

*Sahabat dan Teman*

*Seperjuangan*

*Almamaterku*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Oleh DPPKAD Kota Lubuklinggau. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa S.E. M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E, M.Acc. Ak sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak sebagai Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan sebagai Dosen Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah membimbing penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang.
6. Ibu Ermadiani, S.E.,M.M.,Ak sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan nasehat serta masukan-masukan kepada penulis, dan membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas pembelajaran, serta bantuan dan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan selama ini sampai penulis menyelesaikan perkuliahan.
8. Teristimewa untuk suami saya tercinta Noviandika Syathiruddin, A.Md terimakasih atas segala cinta kasih dan sayang, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta selalu setia menemani dan rela berkorban sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya.
9. Teristimewa untuk anak saya tercinta M. Zafran Uwais Syathiruddin, terimakasih sayang sudah hadir dalam kehidupan mama karena Zafran mama bahagia dan mama bisa menyelesaikan pendidikan.
10. Teristimewa untuk papa dan mama saya yang sangat saya cintai yang tiada henti mendo'akan saya, memberikan saya dukungan serta semangat, terima kasih atas segala kasih sayang, nasihat, waktu, pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya.

11. Saudaraku, Reza Ashabul Kahfi, S.T serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan do'a, semangat, nasihat, serta bantuan dalam segi apapun demi mendukung lancarnya penulisan skripsi ini.
12. Sahabat serta keluargaku diluar kuliah, Tiara, Lisa dan Dian terimakasih atas dukungan dan bantuannya serta memberikan motivasi untuk saya agar tidak selalu cemas.
13. Terimakasih untuk sahabat serta keluargaku Dina, Emil, Adet, Ria, Windik, Yossi, Nindy, Ismi, Saura dan Tiara yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman ku Akuntansi S1 Asal D3 angkatan 2015 Terimakasih atas semua kebersamaan dan dukungannya selama masa perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala amal kebaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan laporan skripsi ini, Aamiin Yarobbal'alam.

Palembang, April 2018

Penulis



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

	Nama	Eryna Noorwanrisha
	NIM	01031481518051
	Tempat, Tanggal Lahir	Lubuklinggau, 29 Juli 1994
	Alamat	Jl.Majapahit
	Handphone	081377746319
<b>Agama</b>	Islam	
<b>Jenis Kelamin</b>	Perempuan	
<b>Status</b>	Menikah	
<b>Kewarganegaraan</b>	WNI	
<b>Tinggi</b>	155	
<b>Berat Badan</b>	69	
<b>Email</b>	noorwanrisha_eryna@yahoo.com	
<b>Pendidikan</b>		
2000 - 2006	SD Negeri 16 Lubuklinggau	
2006 - 2009	SMP Negeri 1 Lubuklinggau	
2009 - 2012	SMA N 1 Lubuklinggau	
2012 - 2015	Program Studi Diploma III, Jurusan Perpajakan, Universitas Sriwijaya	
2015 - 2018	Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya	

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan dan keefisienan pemungutan pajak daerah yang dilakukan DPPKAD terhadap pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau dan ntuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh DPPKAD dalam meningkatkan pemungutan pajak daerah di Kota Lubuklinggau. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kota Lubuklinggau. Pemilihan objek ini didasarkan karena DPPKAD merupakan salah satu SKPD dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah provinsi.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio. Proses penelitian ini diawali dengan pengambilan data-data yang terkait dengan kinerja pemungutan Pajak Daerah Kota Lubuklinggau yang meliputi data target pemungutan pajak daerah, realisasi pemungutan pajak daerah dan biaya pemungutan pajak daerah. Data yang sudah terkumpul dilakukan proses berikutnya yaitu penghitungan secara kuantitatif efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak daerah dengan menggunakan metode analisis rasio, disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil analisis kemudian di diskripsikan untuk menjelaskan tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak daerah kota Lubuklinggau.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa berdasarkan anlisis rasio menunjukkan bahwa kondisi pemungutan pajak daerah Kota Lubuklinggau sudah efisien dengan rata-rata efisiensi 12,10%. Tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 3,83% dan efisiensi terendah pada tahun 2015 dengan tingkat efisiensi 6,19%. Tingkat efisiensi terendah adalah 6,19% sehingga pada tahun 2014-2016 masih dibawah 20%. Dengan demikian pemungutan pajak daerah Kota Lubuklinggau sudah efektif, sedangkan tingkat efektifitas pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau menunjukkan kondisi pada tingkat sudah efektif. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2015 sebesar 83,6% dan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,56% dengan rata-rata tingkat efektifitas tahun anggaran 2014-2016 sebesar 114,29%. Dengan demikian pemungutan pajak daaerah Kota Lubuklinggau sudah efektif karena realisasi pemungutan pajak daerah setiap tahunnya hampir mendekati target pemungutan yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki komitmen dalam meningkatkan pendapatan pajak yang diharapkan juga dapat meningkatkan PAD.

#### ***Kata Kunci : Efisiensi, Efektifitas, Pajak Daerah***

Ketua



Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP.196608201994022001

Anggota



Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak  
NIP.196503111992032002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

### ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the extent of effectiveness and efficiency of local tax collection conducted DPPKAD to the local income of Lubuklinggau City and ntuk know what efforts are made by DPPKAD in improving tax collection in the city of Lubuklinggau. The object of this research is the Office of Revenue Management of Finance and Regional Assets (DPPKAD) in Lubuklinggau City. The selection of this object is based because DPPKAD is one of SKPD and has the duty to execute regional authority in the field of income, financial management and asset as well as carrying out the assistance task given by Local Government or provincial government.

The form of this research is descriptive quantitative research by using ratio analysis. The process of this research begins with the taking of data related to the performance of taxation of Lubuklinggau City Local Tax which includes the data of target of local tax collection, realization of local tax collection and the cost of collecting local taxes. The data that have been collected in the next process is quantitative calculation of efficiency and effectiveness of local tax collection using ratio analysis method, presented in the form of tables and graphs. The analysis results are then described to explain the efficiency and effectiveness of tax collection in Lubuklinggau.

Based on the results of tests that have been done then obtained the result that based on the ratio analysis indicates that the taxation of Lubuklinggau area is efficient with an average efficiency of 12.10%. The highest efficiency level in 2016 is 3.83% and the lowest efficiency in 2015 with an efficiency level of 6.19%. The lowest efficiency level is 6.19% so that in 2014-2016 still below 20%. Thus the taxation of Lubuklinggau City area has been effective, while the level of effectiveness of local taxes levied by the Government of Lubuklinggau City shows the conditions at the level has been effective. The highest level of effectiveness in 2015 amounted to 83.6% and the lowest in 2014 that is equal to 7.56% with the average level of effectiveness fiscal year 2014-2016 of 114.29%. Thus the taxation of the city of Lubuklinggau has been effective because the realization of local tax collection every year is almost close to the target of pre-determined collections. This indicates that the Lubuklinggau Municipal Government has a commitment in increasing tax revenues which is expected to also increase PAD.

*Keywords: Efficiency, Effectiveness, Local Tax*

Ketua



Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP.196608201994022001

Anggota



Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak  
NIP.196503111992032002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Eryna Noorwanrisha  
NIM : 01031481518051  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Oleh  
DPPKAD Kota Lubuklinggau

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tenses nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, April 2018

Pembimbing Skripsi

Ketua

Anggota



Ermadiani, S.E., M.M., Ak  
NIP.196608201994022001



Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak  
NIP.196503111992032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 197303171997031002

## DAFTAR ISI

### **BAB I           PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9

### **BAB II           STUDI KEPUSTAKAAN**

2.1. Pajak dan Ruang Lingkupnya.....	10
2.1.1. Definisi Pajak.....	10
2.1.2. Fungsi Pajak.....	11
2.1.3. Pengelompokkan Pajak.....	12
2.1.4. Manfaat Pajak.....	13
2.2. Otonomi Daerah	
2.2.1. Pengertian Otonomi Daerah.....	13
2.2.2. Landasan Otonomi Daerah.....	14
2.2.3. Tujuan Otonomi Daerah.....	14
2.3. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	15
2.4. Pendapatan Asli Daerah	
2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.4.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.5. Pajak Daerah	
2.5.1. Pengertian Pajak Daerah.....	16
2.5.2. Objek dan Tarif Pajak Daerah.....	17
2.5.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.....	18
2.5.4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	18
2.5.5. Cara Penghitungan Pajak Daerah.....	19
2.6. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah.....	19
2.7. Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah.....	20

2.8. Penelitian Terdahulu.....	21
2.9. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	22
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	23
3.2. Rancangan Penelitian.....	23
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5. Teknik Analisis Data.....	26
3.6. Pengujian Keabsahan Data.....	28
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
4.1. Gambaran Umum Kota Lubuklinggau	
4.1.1. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Kota Lubuklinggau.....	30
4.1.2. Pemerintahan.....	30
4.1.3. Pariwisata.....	31
4.2. Gambaran Umum Tentang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	
4.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD.....	32
4.2.2. Struktur Organisasi.....	33
4.3. Hasil Analisis dan Pembahasan	
4.3.1. Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Lubuklinggau.....	47
4.3.2. Upaya Yang Dilakukan Oleh DPPKAD Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Lubuklinggau.....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Bangsa Indonesia sejak lama mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan keajahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat dimana sumber penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak. Sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar sehingga peran pajak begitu sentral. Pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Sebagaimana yang kita ketahui pajak merupakan iuran wajib masyarakat pada negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan (<http://www.pajakdaerah.go.id>). Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak di berlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah sendiri pun telah dilaksanakan secara luas dan nyata di Indonesia sejak diundangkannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi daerah dinilai sebagai salah satu solusi nyata menuju tatanan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik karena pada dasarnya substansi dari Otonomi Daerah adalah untuk mengedepankan prinsip-prinsip desentralisasi dan pemberdayaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian sistem manajemen daerah dan pelayanan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama yaitu *sharing of power, distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era globalisasi. (Mardiasmo, 2002 : 25).

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Dalam prakteknya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber



penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada bab 5 paragraf kedua pasal 157 menjelaskan tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Komponen sumber pendapatan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, terdiri dari :
  - 1) hasil pajak daerah;
  - 2) hasil retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain PAD yang sah.
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah Bab I Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Bab IV Pasal 5 menjelaskan secara lebih rinci lagi tentang sumber penerimaan daerah sebagai berikut : (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan; (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: (a). Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan; dan (c) Lain-lain Pendapatan. (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: (a) sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; (b)penerimaan Pinjaman Daerah; (c) Dana Cadangan Daerah; dan (d) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pasal 6 ayat 1 di UU tersebut merinci bagian-bagian yang termasuk dalam PAD bersumber dari: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah daerah sebagai hasil implikasi sistem otonomi daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Perda tentang APBD selalu memuat ringkasan tentang PAD beserta target yang harus dicapai dalam satu tahun berjalan (tahun kalender). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 kemudian di perjelas pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bab 1 pasal 10 menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat; kemudian pada pasal 64 menyebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 1948 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli yang lazim di daerah kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani 2009:63 dikutip dari Prameka, 2012).

Untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebenarnya pemerintah dan DPR telah mengeluarkan undang-undang sebagai dasar hukum yang kuat. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda masih ada yang tetap di gunakan sampai dengan tahun 1997. Hal ini terjadi karena ketentuan peralihan undang-undang dasar 1945 memang menerapkan peraturan perundang-

undangan yang masih ada dan masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru (Rahmani;2008:1). Menurut Mikha (2010) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Sidik (2002) melalui penelitian tentang optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah mengemukakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD yang seharusnya menjadi komponen penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang dan daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal.

Dari penguraian beberapa kutipan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (M. Pahala Siahaan, 2010 : 7).

Pemungutan Pajak Daerah tidak lepas dari efektivitas dan efisiensi serta kontribusi terhadap PAD. Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan

dari organisasi dalam mencapai tujuannya (Puspitasari, 2014). Efisiensi adalah biaya yang dipakai pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan layak pada proses pemungutan Pajak Daerah dan yang kemudian dibandingkan dengan jumlah keuntungan keseluruhan, serta perbandingan bersama target. Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004: 135 dalam Octovido dkk, 2014). Rasio Efektivitas menurut Handoko (2013) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah.

Kota Lubuklinggau adalah salah satu pemerintah daerah yang menyelenggarakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber PAD untuk membiayai proses operasional pemerintahan di daerah, dimana proses tersebut membutuhkan dukungan sumber daya finansial yang cukup besar. Sumber daya finansial tersebut dapat diperoleh melalui PAD yang tergolong dalam empat komponen besar yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Kaitannya dengan perumusan dan penerapan komponen PAD dalam hal ini Pajak Daerah sebagai komponen dengan potensi yang cukup besar diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal. Pajak Daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak

daerah dan retribusi daerah cenderung menunjukkan hasil fluktuatif, selain itu juga merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. Sebagai salah satu kota yang tengah berkembang, Lubuklinggau tengah melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan daerahnya dimana Lubuklinggau sendiri memiliki berbagai kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan pasar, kegiatan usaha kecil menengah, dan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH OLEH DPPKAD KOTA LUBUKLINGGAU.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana keefektifitasan dan keefisiensian pemungutan pajak daerah yang dilakukan DPPKAD terhadap pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau?
- 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPPKAD dalam meningkatkan pemungutan pajak daerah di Kota Lubuklinggau?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan dan keefisiensian pemungutan pajak daerah yang dilakukan DPPKAD terhadap pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau.
- 2) Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh DPPKAD dalam meningkatkan pemungutan pajak daerah di Kota Lubuklinggau.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan
- 2) Bagi instansi terkait, penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan masukan atas pemungutan pajak daerah yang dilakukan DPPKAD Kota Lubuklinggau.
- 3) Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi untuk bahan penelitian dan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang serupa dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Atteng, Jovanly. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD di Kota Manado Tahun 2011-2015 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado)*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Amaliah Hakim, Vita. 2013. *Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*. Universitas Siliwangi.

Ayu Puspitasari, Rizky. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Madiun Tahun 2009-2013*. Universitas Negeri Surakarta.

Hardiana Kusuma W, Ira. 2014. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan PAD Di Kota Madiun*. Universitas Negeri Surakarta.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nur Pangastuti, Tetri. 2013. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pahala Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sidik, Mahfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah Bandung 10 April 2002

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Selmba Empat, Jakarta.

Sugiono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akutansi*. PT Refika Aditama, Bandung.

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

[www.pajakdaerah.go.id](http://www.pajakdaerah.go.id)